

POLITIK LUAR NEGERI FILIPINA TERHADAP AMERIKA SERIKAT DI ERA PEMERINTAHAN PRESIDEN RODRIGO DUTERTE TAHUN 2016-2018

Putri Annisa Febriani

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: putri.annisa.2015@fisipol.umy.ac.id

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan tentang alasan renggangnya hubungan luar negeri Filipina dan Amerika Serikat di era Presiden Rodrigo Duterte pada kurun waktu 2016-2018. Ketidakpuasan terhadap respon Amerika yang mengkritik kebijakan *War on Drugs* dari Presiden Duterte dan kuatnya pengaruh Tiongkok di kawasan Asia Pasifik menyebabkan Filipina berada dipersimpangan jalan antara meneruskan hubungan baik dengan Amerika Serikat atau membuka lembaran baru dengan Tiongkok. Renggangnya hubungan Filipina dan Amerika Serikat disebabkan oleh determinan-determinan yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Filipina di era Presiden Rodrigo Duterte, yaitu kebijakan dalam negerinya yaitu *War on Drugs*, usaha Filipina untuk melepaskan diri dari ketergantungan bantuan ekonomi dan militer dan Amerika Serikat, serta upaya Presiden Duterte bermain dua kaki terhadap Amerika Serikat dan Tiongkok untuk meraih keuntungan nasional Filipina.

Kata Kunci: Presiden Duterte, *War on Drugs*, Renggangnya Hubungan Filipina-AS, Tiongkok.

Pendahuluan

Presiden Duterte ternyata tidak main-main dengan janjinya yang akan melakukan “Perang Melawan Narkoba”, untuk menyelesaikan permasalahan Narkoba ini Presiden Duterte memilih untuk menggunakan cara “Keras” yaitu dengan dilegalkannya

penembakan atau pembunuhan terhadap pecandu maupun pengedar Narkoba tanpa melalui proses peradilan yang resmi. Presiden Duterte berjanji akan membunuh 100 ribu penjahat, sebagai bagian dari upayanya memberantas penyalahgunaan Narkoba di Filipina. Sejak dimulai dari Juli 2016 hingga September 2016, operasi ini telah memakan korban tewas lebih dari 3.300 terduga pengedar dan pengguna narkoba tewas, sebagian besar diduga karena praktik pembunuhan di luar hukum. Polisi mengklaim bahwa sekitar sepertiga dari jumlah tersebut tewas dalam adu tembak dengan polisi dalam operasi antinarkoba, sementara sisanya tewas karena perang antar-geng (Sari 2016).

Dugaan pembunuhan di luar hukum yang menyebabkan ribuan orang tewas ini memantik kecaman dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Uni Eropa, Amerika Serikat dan berbagai kelompok hak asasi manusia internasional. Namun, Presiden Duterte menegaskan ia akan terus menumpas tersangka pengedar dan pemakai Narkoba hingga Filipina bersih dari Narkoba. Dalam pidato kepada para pejabat lokal dan eksekutif bisnis, Presiden Duterte menyampaikan rasa kecewa kepada Amerika Serikat karena mengecam taktik Filipina dalam memerangi perdagangan Narkoba. Ia juga menyebutkan bahwa Amerika Serikat sebagai sekutu yang tidak dapat diandalkan.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Duterte juga mengungkapkan kekecewaan terhadap Amerika Serikat karena bukannya membantu Filipina, tetapi malah menjadi pihak yang pertama mengecam kebijakannya dalam perang melawan Narkoba. Bahkan, Presiden Duterte juga mengumpat Presiden Barack Obama untuk pergi ke neraka saja. Dalam kesempatan lain Presiden Duterte memperingatkan lagi bahwa Ia sewaktu-waktu bisa saja memutuskan hubungan dengan Amerika dan lebih suka untuk berhubungan dengan Rusia dan China. Presiden Duterte juga mengungkapkan bahwa jika Amerika Serikat menolak untuk menjual senjata ke Filipina, maka Filipina bisa saja untuk beralih menggunakan senjata impor dari Rusia dan China (BBC 2016).

Sebelumnya, Presiden Duterte menjelang keberangkatannya ke Laos untuk menghadiri KTT ASEAN 2016, mengatakan kepada para wartawan bahwa Ia akan 'mengutuk' Presiden Obama jika mempertanyakan kebijakan kerasnya dalam memberantas perdagangan gelap narkoba. Bahkan, Presiden Duterte mengumpat Presiden Obama dengan *Putang Ina* (anak pelacur), merespon hal tersebut juru bicara

Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat, Ned Price menyampaikan bahwa Presiden Obama tidak akan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Duterte. Sebelumnya Presiden Obama dan Presiden Duterte direncanakan akan melakukan pertemuan bilateral pada Selasa 6 September 2016. Namun, Gedung Putih menyatakan Presiden Obama mengubah jadwal untuk bertemu dengan Presiden Korea Selatan, Park Geun-hye, saat menghadiri KTT ASEAN di ibukota Laos, Vientiane (BBC 2016).

Sikap dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Duterte tersebut sangat berbanding terbalik dengan Presiden Filipina pendahulunya yaitu Benigno Aquino III, dimana ketika berkuasa dan menjabat sebagai Presiden Filipina Periode 2010-2016 Presiden Benigno Aquino berusaha menjaga baik hubungan antara Filipina dan Amerika Serikat. Sudah bukan menjadi rahasia lagi bahwa Filipina merupakan mitra terdekat Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara, hal tersebut tidak lepas dari faktor historis bahwa Filipina sebelum merdeka merupakan wilayah kolonial dari Amerika Serikat. Berdasarkan sejarah Filipina, negara ini pernah dibawah kekuasaan Amerika Serikat pada kurun waktu 1898-1946 (Agoncillo 1990, 187–198).

Ketika dibawah Pemerintahan Presiden Benigno Aquino, Filipina dan Amerika Serikat meningkatkan kerjasama baik di bidang ekonomi, perdagangan, pertahanan dan juga keamanan regional. Hal tersebut dibuktikan dengan Filipina dan Amerika Serikat menandatangani Pakta Pertahanan baru pada 28 April 2014, Presiden Benigno Aquino menyampaikan bahwa kerjasama yang lebih luas antara Amerika dan Filipina akan memperkuat kemampuan mereka untuk berlatih dan beroperasi, serta memberikan reaksi yang lebih cepat terhadap sejumlah tantangan keamanan. Pakta pertahanan itu sendiri penting bagi Filipina yang kekuatan militernya dinilai lemah, serta terus di bawah tekanan China dalam konflik teritorial di perairan Laut China Selatan (Jemadu 2014).

Kebijakan dan sikap dari Presiden Duterte yang kerap melontarkan kritikan keras terhadap Presiden dan Pemerintah Amerika Serikat, karena dianggap mencampuri urusan dalam negeri Filipina dapat berdampak buruk pada hubungan bilateral kedua negara. Selain itu, Presiden Duterte yang mencoba untuk mendekati diri dengan China menyebabkan hubungan Filipina dan Amerika Serikat diambang kehancuran. Seperti

yang kita ketahui bersama bahwa saat ini China merupakan pesaing utama Amerika Serikat dalam memperbutkan pengaruh politik, ekonomi, dan militer global.

Ketika Amerika Serikat mengalami pergantian kekuasaan dari Presiden Barack Obama ke Presiden Donald Trump, terjadi sedikit perubahan dari sikap Presiden Duterte karena Ia berharap Presiden Trump akan memberikan sikap berbeda dan mendukung upayanya untuk perang melawan Narkoba di Filipina. Presiden Trump sendiri mengundang Presiden Duterte ke Gedung Putih pada 30 April 2017, undangan ini juga menunjukkan upaya dari Presiden Trump untuk meredakan ketegangan kedua negara setelah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Barack Obama mengkritik keras kebijakan perang Narkoba yang dikeluarkan oleh Presiden Duterte (TEMPO 2017).

Meskipun demikian, sifat Presiden Duterte yang kontroversial dan temperamental maka akan sangat mungkin Presiden Duterte akan kembali mengeluarkan kritik keras terhadap Amerika Serikat yang dapat membahayakan hubungan bilateral antara Filipina dan Amerika Serikat kedepannya. Hal tersebut menyebabkan gejolak dalam hubungan antar kedua negara yang sebenarnya memiliki sejarah panjang tersebut, hubungan yang tidak harmonis antar kedua negara tersebut tentu saja akan sangat merugikan kedua belah pihak. Hal tersebutlah yang membuat Penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait penyebab-penyebab terjadinya instabilitas hubungan antara Filipina dan Amerika Serikat di era Presiden Duterte dan bagaimana kemungkinan yang akan terjadi terhadap hubungan bilateral kedua negara tersebut.

Konsep Politik Luar Negeri

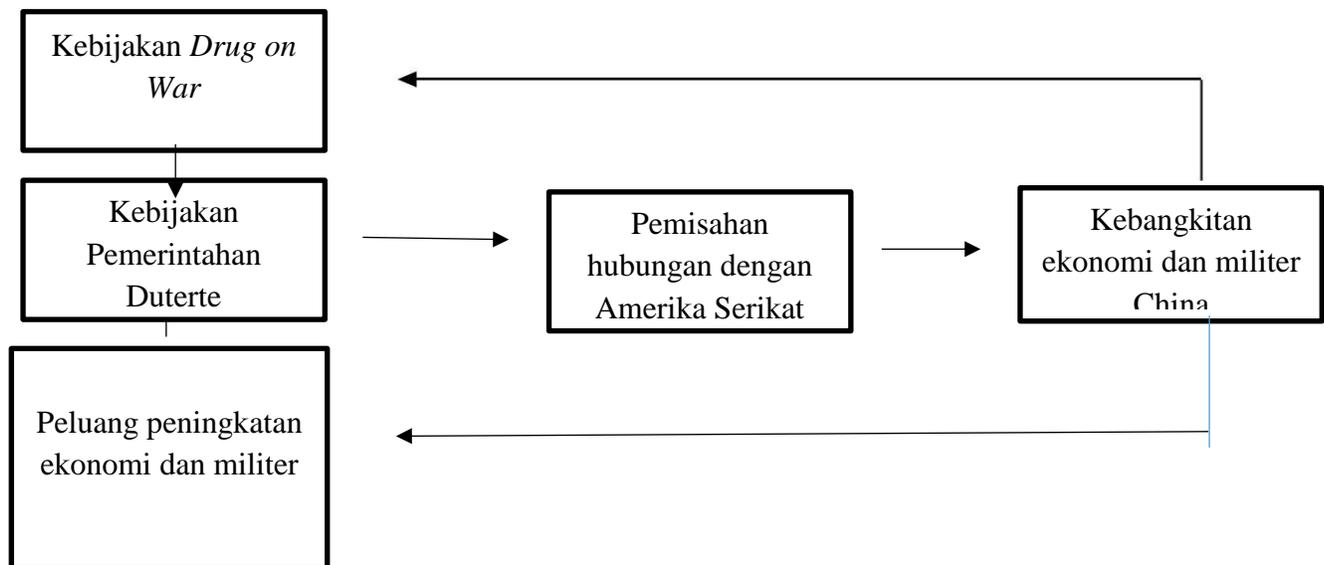
Definisi mengenai politik luar negeri dapat dimulai dengan pendapat para ahli, diantara lain seperti yang dikemukakan oleh Jack C. Plano dan Roy Olton dalam bukunya yang berjudul *The International Relations Dictionary* yang mengemukakan bahwa politik luar negeri merupakan sebuah strategi atau tindakan yang dirumuskan oleh para pembuat kebijakan terhadap negara atau entitas internasional lain (Olton 1969). Dengan tujuan untuk mewujudkan tujuan tertentu berdasarkan kepentingan nasional negaranya. Selanjutnya definisi ini juga diikuti oleh pernyataan Robert Jackson & Georg Sorensen yang mengemukakan bahwa politik luar negeri terdiri dari tujuan-tujuan dan tindakan

yang ditujukan untuk memandu keputusan dan tindakan pemerintah terkait urusan eksternal, terutama dalam hubungannya dengan negara lain (Sorensen 2013).

Pendapat dari para ahli tersebut disempurnakan oleh William D Coplin. Menurut Coplin politik luar negeri merupakan upaya suatu negara untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya, untuk itu terdapat beberapa aspek yang perlu diketahui untuk memahami cara pengambilan keputusan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap sebuah isu Politik luar negeri juga dianggap sebagai sebuah respon suatu negara terhadap tindakan yang dilakukan oleh negara lain. Dalam proses pembuatannya tentu terdapat beberapa determinan yang melatar belakangi para pemimpin atau pembuat kebijakan membuat sebuah keputusan politik luar negeri. Untuk itu William D Coplin mengemukakan terdapat tiga faktor yang mempengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri, seperti yang diilustrasikan ke dalam bagan di bawah ini :

Gambar 2

Politik Luar Negeri Decision Making Presiden Rodrigo Duterte



Pertama, kondisi ekonomi dan militer menurut Coplin kapasitas kekuatan ekonomi dan militer suatu negara dapat ditentukan sebagai instrument politik luar negeri kondisi ekonomi dan militer. Penilaian terhadap kondisi ekonomi suatu negara meliputi Analisa terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran negara begitu juga dengan hubungannya terhadap perbandingan dengan kondisi ekonomi dari negara lain. Sementara itu kondisi kemampuan militer menjadi sebuah instrument yang

memengaruhi pembuatan politik luar negeri suatu negara dengan menekankan pada aspek keamanan dan kemampuan militer suatu negara dalam melindungi teritori serta seluruh warga negara dari ancaman yang datang baik secara langsung maupun tidak langsung dari luar dan dalam negeri.

Dalam hal ini jika melihat dari bagan nomor dua determinan ekonomi dan militer pada masa administrasi Presiden Duterte, adanya aktivitas militer Amerika Serikat di pangkalan Filipina untuk melaksanakan operasi navigasi di wilayah Laut China Selatan diyakini dapat melemahkan posisi Filipina untuk memenangkan arbitrase wilayah yang tengah dalam sengketa tersebut. Sementara itu adanya peluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui kerjasama ekonomi dengan China membuat Presiden Duterte memutuskan untuk melakukan normalisasi hubungan dengan China (Chiang 2017).

Kedua, kondisi politik domestik, menurut Coplin untuk menentukan arah politik luar negeri suatu negara maka dapat diobservasi melalui situasi politik domestik dalam negara tersebut. Situasi politik domestik meliputi faktor kultural maupun sistem politik negara dimana dalam hal ini sistem pemerintahan atau birokrasi suatu negara yang dibentuk oleh pemerintah dapat mempengaruhi praktik kebijakan luar negeri itu sendiri, termasuk faktor budaya yang mendasari tingkah laku politik manusianya.

Pada masa pemerintahan Presiden Duterte didominasi oleh rasa nasionalisme dan identitas yang didasari pada sentiment imperialisme Amerika Serikat terhadap Filipina yang mendorong terjadinya gejolak hubungan antara kedua negara pada periode pemerintahan Presiden Duterte. Hal ini juga ditambah dengan respon negative dari Amerika Serikat terhadap kebijakan *War on Drug* yang dikeluarkan oleh Presiden Duterte membuat pandangannya terhadap Amerika Serikat semakin memburuk.

Ketiga, konteks internasional, menurut Coplin terdapat elemen-elemen yang dalam konteks internasional yang mempengaruhi politik luar negeri suatu negara yaitu meliputi geografis, ekonomi dan politik. Faktor geografis berhubungan dengan perdagangan internasional dan perilaku negara terhadap berbagai hubungan multikultural. Selain itu, keadaan politik internasional yang sedang berlangsung dalam

jangka waktu tertentu secara langsung dapat mempengaruhi negara tersebut berperilaku. (Coplin 1992).

Jika melihat dari sisi konteks internasional pada masa kepemimpinan Presiden Duterte adanya momen kebangkitan ekonomi dan kekuatan militer China membuat Presiden Duterte akhirnya mengarahkan politik luar negerinya terhadap China dan melakukan normalisasi hubungan yang sempat mengalami kemunduran pada masa pemerintahan Presiden sebelumnya yaitu Presiden Aquino III. Lalu, sebagai gantinya pada masa administrasi Presiden Duterte hubungan antara Filipina dengan Amerika Serikat semakin memburuk akibat perubahan arah politik luar negeri Filipina tersebut.

Penyebab Renggangnya Hubungan Filipina Dan Amerika Serikat Di Era Presiden Rodrigo Duterte

A. Kondisi Politik Domestik Filipina

1. Kebijakan *War on Drugs* Duterte

Permasalahan Narkoba sebenarnya tidak hanya dihadapi oleh Filipina saja, tetapi hampir seluruh negara-negara berkembang di berbagai belahan dunia. Narkoba menjadi dalang dari tingginya tingkat kriminalisme di Filipina, baik disebabkan oleh pengguna maupun disebabkan oleh geng-geng Narkoba yang marak di Filipina. Sehingga tidak mengherankan jika Duterte dalam kampanyenya di Pemilihan Presiden Filipina tahun 2016 menjadi *War on Drugs* (Perang Melawan Narkoba) menjadi misi utama yang akan dilaksanakan dengan segala upaya. Duterte berdalih bahwa Ia tidak ingin Filipina menjadi Negara gagal hanya karena generasi mudanya terpengaruh oleh Narkoba. Kebijakan ini sebenarnya tidak baru bagi Duterte, karena ketika menjabat sebagai Walikota Davao Ia juga pernah membuat kebijakan serupa tetapi dengan skala yang lebih kecil.

Letak geografis Filipina yang strategis menyebabkan Filipina menjadi salah satu negara tujuan perdagangan internasional yang salah satunya adalah perdagangan narkoba. Pada tahun 2016, ketika proses pemilihan presiden Filipina,

dua kandidat presiden yaitu Rodrigo Duterte dan Alan Peter Cayetano sama-sama berpendapat bahwa kejahatan dan narkoba adalah penyakit sosial yang perlu diberi label. Mereka menyoroti perang melawan kriminalitas dan obat-obatan sebagai bagian utama dari platform mereka. Melihat bagaimana para calon presiden sangat memperhatikan keterkaitan antara kejahatan dan narkoba mengindikasikan adanya persoalan yang serius terkait narkoba di Filipina yang menyebabkan tingkat kejahatan meningkat. Mengkaji mengenai kriminalitas di Filipina, diketahui jumlah kejahatan meningkat di Filipina sementara kemampuan polisi untuk menyelesaikan kejahatan menurun. Pada tahun 2015, menurut Kepolisian Nasional Filipina (PNP), jumlah kejahatan yang dilaporkan meningkat sebesar 46% dalam 5 bulan pertama dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Kecenderungan yang sama diamati pada tahun 2014. Pada akhir 5 bulan pertama tahun itu, insiden kejahatan meningkat sebesar 18% dibandingkan angka kriminalitas pada tahun 2013.

Tabel 1. 1 Jumlah Kriminalitas di Filipina

	2012	2013	2014
Total reported crimes	217,812	1,033,833	1,161,188
Index crimes	129,161	457,944	492,772
Crime rate (per 100k population)	226	1,053	1,004

Sumber: (Ranada, 2016)

Perang terhadap narkoba jadi jualan utama Duterte selama kampanye dan rupanya sukses besar untuk mengantarkannya sebagai Presiden Filipina ke-16. Duterte menepati janjinya. Usai dilantik pada 30 Juni 2016, per 1 Juli di tahun yang sama Ia mulai menerjunkan aparat kepolisian untuk menyerbu sarang pengedar dan menangkap pengguna dengan kekerasan yang tak main-main. Jika melawan, taruhannya eksekusi ekstra yudisial (*extrajudicial killing*). Metode ini kemudian ditiru oleh kelompok *vigilante* di seluruh negeri yang seakan mendapat legitimasi dari sang Presiden baru. Pengadilan bukan lagi dianggap sebagai lembaga yang diandalkan. Duterte dan barisan pendukungnya pun rajin memaki dan mencibir beragam kritik atas kebijakannya yang didasarkan pada prinsip Hak Asasi Manusia (HAM).

Salah satu hasil positif yang dirasakan oleh masyarakat Filipina dari kebijakan *War on Drugs* ini adalah kejahatan turun lebih dari seperlima di Filipina tahun 2017. Hal yang menggembirakan bagi masyarakat dan memberi indikasi bahwa kampanye anti-narkoba Presiden Duterte yang menimbulkan kemarahan internasional karena masalah Hak Asasi Manusia (HAM) ternyata dapat mencegah tindak kejahatan di masyarakat. Tindak kejahatan terhadap manusia

dan harta benda menurun 21,8 persen dari Januari sampai akhir November tahun 2017, dibanding periode yang sama tahun 2016, demikian menurut data Angkatan kepolisian Nasional Filipina yang dikutip media dalam negeri. Data tersebut menunjukkan kemajuan dalam kampanye anti-narkoba Duterte yang kontroversial serta keseluruhan usaha kepolisian, kata Antonio Contreras, ilmuwan politik di Universitas De La Salle di Filipina. Menurut Antonio ini adalah penurunan besar, jadi ini merupakan indikasi bahwa usaha pemerintah berhasil (VOA Indonesia 2017).

Kebijakan anti-kejahatan Duterte fokus pada janji kampanyenya untuk menyelesaikan masalah peredaran Narkoba dalam jangka waktu enam bulan nyatanya memang menakutkan. Baru sebulan berkuasa 400 tersangka pengedar dan pengguna narkoba tewas, sebagian besar karena baku tembak dengan polisi. Sementara lebih dari 4.400 tersangka ditahan. Situasi ini ternyata membuat takut para pengedar dan pengguna narkoba sehingga sekitar 500.000 orang memilih menyerahkan diri kepada polisi. Di antara mereka yang menyerah karena takut ditembak mati adalah tiga orang wali kota dan seorang mantan wali kota yang berasal dari provinsi Maguindanao, wilayah selatan Filipina. Kemudian Duterte mengatakan, Ia tengah mempertimbangkan pendirian pusat rehabilitasi di kamp-kamp militer negeri itu untuk menampung para pengguna narkoba yang menyerah (Kompas 2016).

Presiden Duterte mendapatkan penilaian bagus dalam sebuah jejak pendapat untuk 90 hari pertama sebagai pemimpin negara Filipina, terutama berkat perang totalnya melawan Narkoba dan pernyataan pedasnya terhadap para pemimpin Barat, baik itu AS maupun Eropa. Tercatat hanya 11 persen dari 1.200 warga Filipina yang disurvei oleh badan *Social Weather Stations (SWS)* yang mengaku tidak puas atas kinerja Duterte. Dengan demikian Duterte mendapatkan tingkat kepuasan 64 persen sehingga mencatat awal pemerintahan yang lebih baik daripada pendahulunya yaitu Benigno Aquino, Joseph Estrada, sampai Gloria Macapagal Arroyo.

Sebuah survei serupa oleh *Pulse Asia*, sekitar satu bulan setelah Duterte mulai berkuasa pada 30 Juni mencatat angka kepercayaan publik 91 persen untuk

kepemimpinan Duterte. Duterte memenangkan Pemilihan Presiden Filipina pada 9 Mei 2019 dengan selisih suara sangat besar setelah berjanji memperluas kampanye pemberantasan kejahatan yang sudah Ia rintis sejak menjadi walikota Davao sehingga Ia digelari "*Duterte Harry*" (Si Penghukum) yang diambil dari judul film *Dirty Harry*. Analisis politik Nelson Navarro menyebut survei SWS itu sebagai bukti rakyat Filipina merasa lebih aman karena Duterte menepati janjinya untuk perang melawan kriminal dan Narkoba. Sikap kerasnya telah membuatnya populer di seluruh penjuru Filipina. Dari jejak pendapat SWS itu yang mengatakan Duterte "hebat" diatas 70 persen, sedangkan yang menyebutnya "sangat bagus" ada 50-69 persen (Sidik 2016).

Dengan besarnya dukungan dan kepuasan atas awal masa pemerintahannya, hal tersebutlah yang membuat Presiden Duterte merasa memiliki legitimasi yang kuat dalam politik dalam negeri Filipina. Hasil Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden Filipina tahun 2016 menunjukkan bahwa di dalam Pemerintahan Filipina saat ini Duterte memiliki posisi yang kuat, sehingga Duterte tidak takut untuk membuat kebijakan yang terkesan kontroversial. Salah satu kebijakan yang kontroversial adalah merenggangkan hubungan luar negeri dengan AS yang notabene merupakan Sekutu dari negara Filipina dalam beberapa dekade terakhir.

Hal yang membuat Duterte tidak suka dengan AS adalah kritikan mereka terhadap kebijakan *War on Drugs* yang dilakukan oleh Duterte. AS sebagai salah satu Negara utama penyangga PBB dan salah satu Negara yang memegang Hak Veto merasa perlu untuk menjamin Hak Asasi Manusia (HAM) di seluruh penjuru dunia. Tetapi inilah yang membuat Duterte berang dan merasa didikte oleh AS dalam kebijakan dalam negeri Filipina. Bahkan dalam beberapa kesempatan Duterte tidak segan untuk memaki AS dan Presiden Obama, salah satunya adalah saat kunjungan Presiden Duterte ke Jepang tahun 2017. Ketika itu Presiden Duterte juga mengancam untuk memutuskan hubungan dengan AS.

2. Filipina Mengalami Duterte Sentris

Pasca Pemilihan Presiden Filipina dan terpilihnya Rodrigo Duterte sebagai Presiden baru Filipina ke 16 terjadi suatu perubahan besar dalam politik dalam negeri Filipina. Hal tersebut tidak lepas dari keberhasilan Duterte dalam menunaikan janji-janji politiknya pada saat masa Pemilihan Presiden tahun 2016. Dalam waktu relatif singkat Duterte berhasil menekan tingkat kriminalitas di Filipina, perbaikan layanan publik, dan kestabilan perekonomian Filipina. Meskipun dalam pelaksanaan kebijakannya menimbulkan kontroversial dan kecaman dunia internasional terutama dalam kebijakan *War on Drugs* yang mengizinkan adanya *Extrajudicial Killing* terhadap pengguna dan pengedar Narkoba.

Berkat beberapa keberhasilannya dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan klasik di Filipina, Presiden Duterte memiliki tingkat kepuasan publik dan kepercayaan publik yang begitu tinggi. Sikap tegas dan kerasnya terhadap pemimpin-pemimpin Barat (AS dan Eropa) terhadap kritik dan campur tangan mereka terhadap kebijakan dalam negeri Filipina membuat Presiden Duterte sangat disukai oleh rakyat Filipina. Hal ini lah yang kemudian Penulis sebagai *Duterte centris* yang sedang melanda Filipina. Pada masa Pemerintahannya, Duterte kerap kali melontarkan kritikan kepada lawan politik, Senator, bahkan Pihak gereja Katolik Filipina yang tidak sependapatnya. Duterte juga kerap membuat pernyataan dan kebijakan luar negeri yang didasarkan pada naluri.

Presiden Duterte pernah berkonfrontasi dengan anggota Parlemen Filipina karena anggota parlemen tersebut memberikan kritik terhadap kebijakan *War on Drugs* Duterte. Selain itu, Presiden Duterte juga berkonfrontasi dengan pihak Gereja Katholik Filipina karena membela para pengguna Narkoba dan Presiden Duterte pernah menyebut Tuhan itu bodoh. Bahkan untuk memprovokasi pihak Gereja Katholik, Presiden Duterte pernah mengatakan bahwa sebenarnya Ia adalah bagian dari Islam dan meneriakkan takbir "*Allahuakbar*". Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa faktanya Ibu dari Presiden Duterte merupakan berasal dari

suku Bangsamoro, suku yang mayoritas Islam yang mendiami wilayah Selatan Filipina.

Presiden Duterte seperti anti-kritik dalam menjalankan Pemerintahannya, bahkan Wakil Presiden Filipina saat ini pun harus melakukan kritikan terhadap kebijakan Presiden Duterte dari luar Pemerintahan atau melalui media. Pemerintah daerah dan sebagian rakyat yang kurang suka terhadap kebijakan Presiden Duterte pun tidak berani untuk bersuara lantang, mereka khawatir akan keselamatan terhadap nyawa dan keluarga mereka. Hal tersebut karena bisa saja mereka diserang oleh kelompok *vigilante* dengan tuduhan mendukung atau berkelompok dengan geng, pemakai, atau pengedar Narkoba.

Sehingga tidak mengherankan jika dalam pengambilan kebijakan luar negeri pun Presiden Duterte sangat anti-kritik, salah satunya yaitu menjaga jarak dengan AS yang mengkritisi kebijakan *War on Drugs* yang dikeluarkan Presiden Duterte dan lebih mendekati diri terhadap Tiongkok karena lebih mendukung kebijakan tersebut dan tidak berusaha mendikte kebijakan dalam negeri Filipina. Hal ini lah yang memicu gejolak dalam hubungan bilateral antara Filipina dan AS yang menciptakan ketidakharmonisan dalam beberapa tahun ke belakang.

B. Kondisi Ekonomi dan Militer Filipina

1. Kondisi Ekonomi Filipina

Pada beberapa tahun terakhir ini ekonomi Filipina memang tumbuh lebih cepat dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara, hal tersebut menurut para ahli merupakan hasil berkat diplomasi yang lebih kuat Filipina dengan Tiongkok dan Jepang, serta meningkatnya pembelanjaan dalam bidang infrastruktur dan industri *call center*. Total nilai barang dan jasa di Filipina naik 6.7 persen tahun 2016, menurut perkiraan pemerintah Filipina. Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan ekonomi Filipina bernilai 311 Miliar Dolar. Juru bicara presiden Filipina, Ernesto Abella mengutip pencapaian dalam kemitraan luar negeri sebagai alasan bangkitnya pertumbuhan ekonomi. Sejak

menjabat bulan Juni 2016, Presiden Rodrigo Duterte telah menjalin ikatan baru dengan Tiongkok dan mempererat ikatan dengan investor Jepang.

Bulan Oktober 2017, Presiden Duterte mengunjungi kepala-kepala negara di Tiongkok dan Jepang sebagai bagian dari kebijakannya untuk mengurangi ketergantungan dengan AS yang merupakan bekas koloni Filipina. Tiongkok menjanjikan bantuan bernilai 24 miliar Dolar dan para ekonom memperkirakan Jepang akan berinvestasi di pabrik-pabrik serta mendanai proyek-proyek pembangunan. Tahun 2017, Presiden Duterte akan mengepalai ASEAN, sebuah organisasi multilateral yang beranggotakan 10 negara Asia Tenggara dan juru bicaranya mengatakan kepada media setempat bahwa peran itu akan membantu Presiden Duterte dalam membentuk lebih banyak kemitraan luar negeri (VOA Indonesia 2016).

Filipina sempat mendapatkan label sebagai “negara pesakitan di Asia”, namun Filipina kini bangkit dan berlari meninggalkan tetangganya di Asia Tenggara. Mereka menjelma menjadi macan ekonomi Asia berkat tingkat pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Melansir dari Bloomberg, kebangkitan Filipina dimulai dengan mantan Presiden Benigno Aquino, yang mulai menjabat pada 2010, dengan memberantas korupsi, mengangkat pendapatan kelas menengah, dan meningkatkan peringkat kredit investasi untuk pertama kalinya. Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi Filipina akan mencapai lebih 6% sampai 2019, mirip saat pesatnya ekonomi Malaysia dan Thailand pada dekade 1990-an. Data Bank Dunia yang dirilis ini, menunjukkan pertumbuhan ekonomi Filipina pada 2016 sebesar 6,8%.

Filipina mendapat keuntungan dengan populasi penduduk muda yang meningkat dan produktif, sehingga membantu meningkatkan produksi yang ujung-ujungnya meningkatkan jumlah kelas menengah di negara tersebut. Sementara itu, di bawah pimpinan Presiden Duterte, Filipina sedang dan akan mengembangkan proyek infrastruktur dengan nilai ambisius 160 miliar Dolar atau setara Rp2.136 Triliun. Mereka juga mendorong masuknya investasi lebih besar dari Tiongkok, Rusia, dan Timur Tengah. Frederic Neumann, wakil kepala penelitian ekonomi Asia di HSBC Holdings Plc di Hong Kong mengatakan bahwa

mereka melihat transformasi kuat di Filipina, yaitu Administrasi baru (Pemerintahan Duterte) yang bekerja keras memastikan stabilitas makro-ekonomi sebagai jangkarnya yang membuat perekonomian lebih maju bagi Filipina.

Saat ini ukuran ekonomi Filipina mencapai 292 miliar Dolar, lebih dari dua kali ukuran Malaysia dan 10 kali lebih besar dari Singapura pada 1960. Bank Pembangunan Asia (ADB) menyatakan bahwa pendapatan per kapita per tahun di Filipina kini mencapai 4.126 Dolar atau setara Rp 55 juta, sama seperti di Tiongkok, Malaysia, dan Thailand. ADB mengatakan Filipina juga sukses meningkatkan manufaktur sebagai kunci dalam penyediaan lapangan kerja lebih banyak. Pasalnya, Filipina sangat menggantungkan dari ekspor di kawasan. Adapun belanja rumah tangga meningkat sekitar 70% dari produk domestik bruto, naik lebih dari 6%. Ekonomi Filipina lepas landas seperti Thailand dan Malaysia yang membangun manufaktur mereka. Mereka juga melakukan perbaikan infrastruktur dan menarik lebih banyak investasi asing.

Investasi langsung asing (*foreign direct investment/FDI*) ke Filipina melonjak lebih dari lima kali lipat sepanjang 2010-2015 menjadi 5,8 miliar Dolar, meski masih kalah dibandingkan Thailand 9 miliar Dolar dan Malaysia 11 miliar Dolar. Untuk bersaing, Duterte berencana meningkatkan belanja infrastruktur sampai 7% dari PDB, lebih tinggi dari sebelumnya, sebesar 5%. Presiden Duterte juga mendorong perubahan undang-undang pajak untuk meningkatkan pendapatan negara. Jika Filipina berhasil mendorong reformasi pajak dan meningkatkan belanja infrastruktur, manufaktur menjadi penopang berikutnya dari pertumbuhan ekonomi dan menambah pemasukan masuk bagi Filipina, kata Michael Wan, ekonom Credit Suisse Group AG di Singapura. Wan pun memperkirakan hal ini dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi Filipina hingga 7% pada tahun-tahun mendatang (Ventura 2017).

Bank Sentral Filipina masih meyakini kebijakan moneter saat ini masih sesuai dengan perkembangan yang ada. Ekonom memandang peningkatan harga imbas dari kuatnya permintaan memungkinkan adanya pengetatan kebijakan ke depan. Para ekonom juga sempat mengkhawatirkan kebijakan yang diambil oleh Presiden Duterte yang melarang keras peredaran obat-obatan terlarang dan *War*

on Drugs dapat membebani sentimen investor. Tetapi Presiden Duterte dapat mengembalikan kepercayaan para investor dengan berkomitmen untuk mengembangkan bandara, jalan, kereta api, dan pelabuhan selama 6 tahun ke depan senilai 180 miliar Dolar. Langkah ini dilakukan untuk menarik langsung investasi langsung yang berimbas ke pertumbuhan ekonomi Filipina (Chandra 2017).

2. Kondisi Militer Filipina

Filipina bukanlah Negara dengan kekuatan militer yang besar, bahkan di Asia Tenggara pun Filipina menempati urutan bawah dalam hal kekuatan militer. Sehingga Filipina harus membuat kerja sama militer dengan Negara lain, yaitu AS. Kompensasinya adalah Filipina harus mau memberikan izin wilayahnya yang dijadikan pangkalan ataupun lokasi kerja sama pertahanan dengan AS dalam konteks *US military dispositions in the Western Pacific*. Dalam *The Military Balance 2017* terbitan *The International Institute for Strategic Studies* menyebutkan bahwa Filipina juga memberikan tempatnya bagi Angkatan Udara AS di Clark Air Base, serta bagi pasukan Marinir AS di Camp Aguinaldo. Pentingnya kawasan Asia Tenggara tersebut terutama karena ada isu mengenai sengketa Laut China Selatan.

Dalam *Index Power* yang dirilis *Global Fire Power* pada 2017, di kawasan Asia Tenggara, Filipina menempati posisi ke enam. *Index Power* tersebut pada dasarnya merupakan nilai gabungan dari berbagai variabel: jumlah personel militer, kekuatan alutsista, anggaran, nilai utang suatu negara, geografi wilayah, dan sebagainya. Nilai yang semakin kecil dalam *Index Power* tersebut berarti semakin baik kekuatan militernya. Negara dengan skor indeks yang bagus belum tentu kuat dalam soal alutsista. Atau, sebaliknya, negara dengan skor rendah belum tentu sedikit proporsi jumlah personel sumber daya militernya. Untuk mendapatkan gambaran kekuatan militer yang sebenarnya, memang tidak dapat hanya dilihat berdasarkan skor, tetapi perlu melihat secara mendalam setiap komponennya (Noah Friedman 2017). Berikut merupakan info gambar terkait *Index Power* Negara-negara ASEAN :

Gambar 1.1 Skor *Index Power* Negara-Negara ASEAN



Selain dari sisi personel militer, kekuatan militer juga terlihat dari alutsista yang dimiliki oleh suatu negara. Kekuatan alutsista militer sendiri dapat dibagi berdasarkan matranya. Ada matra angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara. Tidak semua negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekuatan militer yang merata untuk semua level matra tersebut. Bahkan, kecenderungannya, matra angkatan darat menjadi kekuatan militer yang dominan di kawasan, sekalipun negara seperti Filipina adalah negara kepulauan, yang idealnya, kekuatan matra angkatan laut harusnya perlu menjadi kekuatan militer utama.

Gambar 1.2 Kekuatan Angkatan Darat Negera-Negara ASEAN



Dari analisa perbandingan menggunakan data *Global Fire Power*, kekuatan matra angkatan darat yang dominan di Asia Tenggara adalah dari negara Vietnam. Vietnam menduduki posisi utama dalam soal alutsista matra angkatan darat dengan memiliki 1.545 tank tempur, 3.150 kendaraan lapis baja, 524 artileri swa-gerak, 2.200 artileri dan 1.100 peluncur roket. Sementara Indonesia, wilayah yang luasnya jauh lebih besar daripada Vietnam, berada di posisi keempat dengan 418 tank tempur, 1.089 kendaraan lapis baja, 37 artileri swa-gerak, 80 artileri dan 86 peluncur roket. Sedangkan Filipina hanya menempati posisi ke delapan.

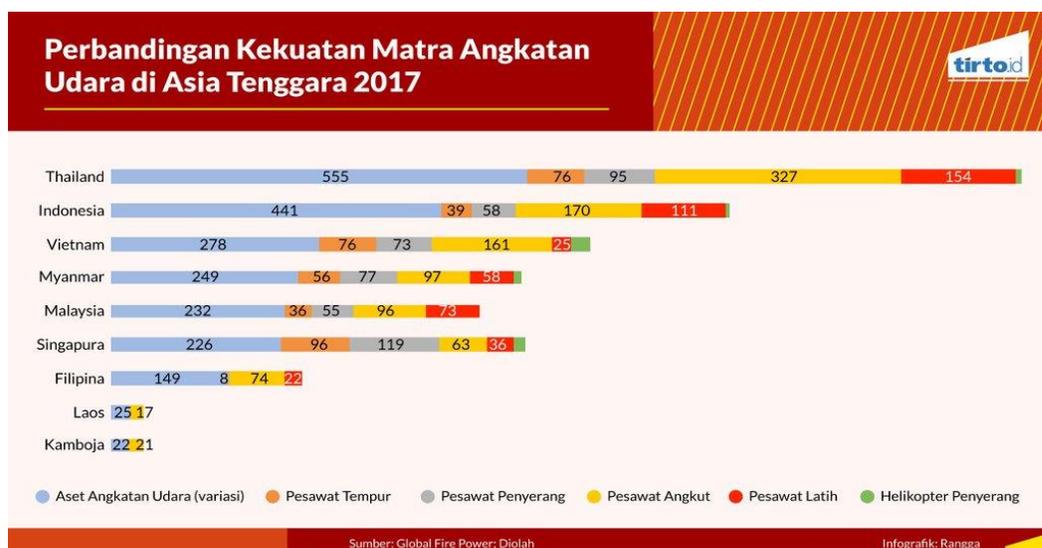
Gambar 1.3 Kekuatan Angkatan Laut Negara-Negara ASEAN



Untuk kekuatan matra angkatan laut, diketahui Thailand memiliki alutsista yang lebih unggul di Kawasan ASEAN. Sekalipun, luas wilayah lautannya tidak terlalu besar, tapi Thailand memiliki 1 kapal induk, 8 kapal Frigrat, 7 corvettes, 32 kapal patroli dan 7 kapal perang. Sementara Filipina hanya memiliki 149 Aset Angkatan Laut (Variasi), 10 corvettes, 36 kapal patroli. Bahkan, Filipina yang memiliki wilayah laut yang luas sama sekali tidak memiliki kapal induk.

Kekuatan alutsista angkatan udara pun, di Kawasan Asia Tenggara pun dikuasai oleh Thailand. Dimana Thailand tercatat memiliki 76 pesawat tempur, 95 pesawat penyerang, 327 pesawat angkut, 154 pesawat latih dan 7 helikopter penyerang. Sementara Filipina, hanya memiliki 8 pesawat tempur, 74 pesawat angkut, 22 pesawat latih dan 149 Aset Angkatan Udara (variasi). Adanya sengketa Laut Cina Selatan, kehadiran militer AS ataupun kebutuhan peningkatan kekuatan militer untuk keperluan dalam negeri akhirnya memunculkan ketergantungan impor alutsista di negara-negara Asia Tenggara. Pada kurun 2015-2016, Vietnam menjadi negara yang paling tinggi dalam soal impor alutsista di Asia Tenggara.

Gambar 1.3 Kekuatan Angkatan Udara Negara-Negara ASEAN



Hal ini memberi gambaran bahwa kekuatan militer Filipina diantara negara-negara di Asia Tenggara pun masih tertinggal jauh. Data secara umum soal *Index Power* dari *Global Fire Power* yang menempatkan Filipina dalam posisi ke enam di Asia Tenggara menjadikan kita paham bahwa Filipina memang membutuhkan aliansi atau kerja sama militer dengan Negara-negara yang memiliki kekuatan besar dalam bidang militer, sehingga kekuatan militer memang menjadi salah satu determinan dalam pembuatan kebijakan luar negeri dari setiap Negara. Dengan adanya ancaman stabilitas kawasan, terutama menyangkut kehadiran militer dari kawasan lainnya ataupun peningkatan kekuatan demi aspek keamanan dalam negeri, maka perlombaan impor alutsista cenderung akan menjadi aspek pertama dalam kompetisi militer dalam kawasan (Kurniawan 2017).

C. Determinan dari Konteks Internasional

1. Perebutan Pengaruh dan Hegemoni antara Tiongkok vs AS

Pada era ini tidak dapat dipungkiri bahwa dunia internasional kembali terpolarisasi terhadap dua kutub, yaitu AS dan Tiongkok. Pasca berakhirnya Perang Dingin pada tahun 1990-an antara AS dan Uni Soviet dengan ditandai bubarnya Negara Uni Soviet, maka praktis AS menjadi satu-satunya Negara Adidaya kala itu. Seiring berjalannya waktu, Tiongkok dengan sumber pendanaan yang tidak terbatas muncul menjadi pesaing baru AS sebagai Negara *Super Power* melalui kekuatan ekonomi dan militernya. Sehingga terjadilah persaingan perebutan pengaruh antara AS dan Tiongkok terhadap Negara-negara di seluruh penjuru dunia.

Pada tiga Perang sebelumnya, yaitu Perang Dunia I, Perang Dunia II, dan Perang Dingin Negara AS selalu muncul sebagai pemenangnya. Sehingga tidak mengherankan jika AS memiliki pengaruh yang begitu besar dalam hubungan internasional dan terkesan mengendalikan organisasi-organisasi internasional. Kala itu AS tidak hanya kuat di bidang militer tetapi juga sangat kuat di bidang ekonomi. Dalam usahanya menanamkan pengaruh dan hegemoni, AS pernah mengeluarkan kebijakan *Marshal Plan* yaitu program bantuan pinjaman dana bagi Negara-negara yang hancur akibat Perang Dunia. Kemudian, AS juga membangun banyak pangkalan-pangkalan militer di seluruh penjuru dunia dengan dalih sebagai penjamin keamanan dunia, termasuk di Filipina.

Saat ini, pola yang sama juga sedang dilakukan oleh Tiongkok. Negara Tiongkok dalam Dekade terakhir ini memang mengalami peningkatan yang signifikan dalam bidang ekonomi dan militer. Bahkan, saat ini pertumbuhan ekonomi Tiongkok adalah nomor satu di dunia. Tiongkok berupaya menanamkan pengaruh terhadap Negara-negara berkembang dan tertinggal dengan bantuan dan kerja sama dalam bidang ekonomi. Terutama dibawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping, Negara Tiongkok sangat gencar melakukan kebijakan tersebut. Tiongkok dibawah Presiden Xi Jinping mengeluarkan gagasan besar yaitu *One Belt One Road (OBOR)* dimana kebijakan ini adalah ingin mengajak Negara-negara di dunia untuk menghidupkan kembali jalur perdagangan Sutra kuno, baik melalui jalur darat maupun laut.

Dalam upaya merealisasikan gagasan tersebut, Tiongkok membentuk *Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)* untuk pendanaannya. Melalui program OBOR dan AIIB ini lah Tiongkok masuk menanamkan pengaruhnya terhadap Negara-negara berkembang dan tertinggal. Presiden Duterte yang baru menjabat sebagai Presiden Filipina pada akhir Juni 2016 tentu saja sangat mengetahui bahwa Filipina akan terseret dalam arus perebutan hegemoni dan pengaruh antara Tiongkok dan AS ini. Filipina secara historis dan geografis memang memiliki posisi yang menarik sehingga bisa menjadi modal yang baik bagi Tiongkok maupun AS jika berhasil menanamkan pengaruhnya di Filipina.

Filipina merupakan Negara bekas koloni AS yang sempat diduduki oleh AS selama puluhan tahun lamanya. Meskipun memiliki rasa ketidaksukaan terhadap AS, tetapi nyatanya Filipina tetap menjadi sekutu terdekat AS di kawasan Asia Tenggara. Filipina selalu membutuhkan AS baik dalam bidang ekonomi melalui pinjaman hutang luar negerinya maupun militer melalui hibah maupun pembelian alat-alat perangnya dan latihan militer bersama. Di sisi lain, Tiongkok pada beberapa tahun terakhir menunjukkan kekuatan ekonomi dengan pinjaman lunak dan bunga ringan bagi Negara-negara berkembang, sehingga membuat Presiden Duterte tertarik untuk bergabung dalam proyek ambisius OBOR dan pendanaan dari AIIB sehingga sangat menarik bagi Tiongkok jika akhirnya berhasil menanamkan pengaruh di Filipina.

Selain itu, Tiongkok juga menunjukkan kekuatan militernya dengan menempatkan tentaranya di wilayah sengketa Kepulauan Spartley di Laut China Selatan. Bahkan, saat ini Tiongkok juga sedang membangun Pulau reklamasi yang nantinya akan dijadikan sebagai pangkalan militernya untuk mengontrol perlintasan di wilayah Laut China Selatan. Filipina termasuk Negara yang bersengketa dengan Tiongkok atas wilayah yang diklaim oleh Tiongkok secara sepihak tersebut. Dalam gugatannya ke Mahkamah Internasional pun Filipina memenangkan gugatan yang menyatakan bahwa Tiongkok tidak berhak untuk mengelola wilayah sengketa di Kepulauan Spartley sebelum adanya keputusan bersama Negara-negara yang bersengketa.

Dalam sengketa wilayah Laut China Selatan itu sebetulnya ini AS sebenarnya juga memiliki kepentingan sendiri. Hal tersebut karena kapal-kapal dagang AS merupakan salah satu yang terbanyak melintasi wilayah tersebut, sehingga wilayah tersebut menjadi penting bagi perekonomian AS. Tetapi hal berbeda ditunjukkan oleh Presiden Duterte dari pendahulunya yaitu Presiden Benigno Aquino III yang sangat menentang pendudukan Tiongkok atas wilayah Laut China Selatan. Kebijakan yang diambil oleh Presiden Duterte lebih kompromis dan berusaha untuk menguatkan hubungan dengan Tiongkok.

2. Filipina Berada di Persimpangan Jalan

Dalam hubungan internasional, sebuah Negara tentu saja mengharapkan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dalam menjalin hubungan kerjasama baik itu kerjasama bilateral maupun multilateral. Cara yang dapat dilakukan untuk membuat kebijakan ataupun keputusan luar negeri menurut Copli yaitu harus memahami peta kekuatan dan fenomena dari konteks internasional itu sendiri. Filipina saat ini merasa berada di persimpangan jalan karena di satu sisi AS adalah sekutu utama mereka dan telah menjalin kerjasama erat selama puluhan tahun baik dalam bidang ekonomi maupun militer. Sedangkan Tiongkok adalah kekuatan baru dunia yang muncul dengan gagasan ekonomi yang sangat menggiurkan bagi Negara-negara berkembang seperti Filipina untuk memajukan infrastruktur dan ekonomi di negaranya. Dalam bidang militer pun Filipina juga sangat kalah disbanding Tiongkok, sehingga bersitegang dalam konflik di laut China Selatan pun hanya akan merugikan Filipina itu sendiri.

Hal ini lah yang sepertinya dibaca oleh Presiden Duterte, sehingga secara pelan-pelan berusaha membawa Filipina untuk melepaskan diri dari ketergantungan seutuhnya terhadap Filipina terutama dalam bidang ekonomi dan militer. Presiden Duterte berusaha untuk bermain dua kaki, yaitu dengan tidak meninggalkan hubungan dan kerja sama dengan AS seutuhnya tetapi juga menjajaki hubungan kerja sama yang intens dengan Tiongkok. Sikap Tiongkok yang menyatakan dukungan pada Filipina dalam perang melawan Narkoba dan disampaikan langsung oleh Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Geng Shuang mengatakan Tiongkok mengerti dengan kebijakan Presiden Duterte meski banyak dikiritik Barat. Dilansir dari *Asian Correspondent* membuat Presiden Duterte senang, kebijakan Tiongkok ini berkebalikan dengan kebijakan AS yang mengkritik kebijakan Presiden Duterte tersebut.

Kemudian Presiden Duterte berkunjung ke Tiongkok pada tahun 2017. Pada saat itu Presiden Duterte membawa sejumlah besar delegasi, sekitar 250 eksekutif bisnis. Presiden Duterte bertemu dengan Presiden Xi Jinping, PM Li Keqiang dan Ketua Kongres Zhang Dejiang. Selain itu, Presiden Duterte juga

sowan dengan komunitas Filipina yang tinggal di Cina. Pertemuan tersebut bertujuan meningkatkan hubungan bilateral. Sejumlah agenda yang dibahas meliputi ekonomi, bisnis dan perjanjian investasi. Duta Besar Cina untuk Filipina, Zhao Jianhua pada Rappler sempat mengatakan bahwa kedua pemimpin tidak membahas isu Laut Cina Selatan.

Hasil dari kunjungan tersebut adalah Filipina menerima tawaran investasi dari Tiongkok dalam bidang infrastruktur yang juga masuk dalam rangkaian rencana proyek OBOR jalur laut. Presiden Duterte seperti menyadari bahwa Filipina tidak akan bisa melawan Tiongkok dari segi ekonomi maupun militer dalam hal perebutan wilayah sengketa di Laut China Selatan. Sehingga jalan terbaiknya adalah bekerjasama agar bisa merundingkan agar setiap Negara mendapatkan keuntungan yang sama dan tidak ada yang merasa dirugikan. Hal tersebut juga disampaikan oleh Presiden Duterte dalam forum ASEAN agar ASEAN melibatkan Tiongkok dalam pembuatan *code of conduct* dalam penyelesaian sengketa di Laut China Selatan.

Kepentingan nasional Negara tentu saja menjadi tujuan seluruh Negara dalam menjalin hubungan maupun kerja sama internasional. Hal tersebut pula yang sedang diperjuangkan oleh Presiden Duterte. Ia ingin negaranya tidak didikte oleh Negara manapun, sehingga Ia membuat kebijakan untuk sedikit menarik diri dari sekutu lamanya AS dan berusaha untuk membuka diri terhadap kemungkinan-kemungkinan kerja sama yang akan dilaksanakan dengan Tiongkok. Hal ini lah yang menimbulkan gejolak dan ketidakharmonisan hubungan AS dan Filipina di era Presiden Duterte. Meskipun Kepemimpinan AS telah berganti dari Presiden Obama ke Presiden Donald Trump yang juga setipe dengan Presiden Duterte nyatanya tidak membuat Presiden Duterte berubah pikiran begitu saja dan tetap bermain di dua kaki dalam hubungan Filipin dengan AS dan Tiongkok.

Kesimpulan

Hubungan bilateral dua Negara berdaulat tidak selamanya berjalan lancar, terkadang ada beberapa penyebab yang kemudian membuat hubungan dua Negara menjadi bergejolak dan berjalan tidak harmonis. Hal tersebut bisa terjadi karena pergantian rezim di salah satu Negara,

sengketa wilayah, pergeseran orientasi politik luar negeri maupun perubahan kepentingan nasional yang ingin diraih dari sebuah hubungan. Ada banyak determinan yang kemudian mempengaruhi pembuatan sebuah kebijakan luar negeri suatu Negara, kemudian oleh William D. Coplin disederhanakan menjadi tiga determinan utama yang mempengaruhi kebijakan Politik Luar Negeri sebuah Negara. Tiga determinan tersebut yaitu kondisi politik domestik, kondisi ekonomi dan militer, serta konteks internasional. Dari uraian dan analisa penulis di BAB-BAB sebelumnya, dalam kasus terjadinya gejolak hubungan bilateral antara Filipina dan AS maka Penulis menyimpulkan bahwa berdasarkan pada penerapan Konsep Politik Luar Negeri dari Coplin, secara tidak langsung tiga determinan tersebut memang berpengaruh dalam kebijakan Politik Luar Negeri Filipina di era Presiden Duterte terhadap AS.

Dari determinan kondisi politik domestik, Presiden Duterte memiliki legitimasi yang kuat karena menenangkan Pemilihan Presiden Filipina tahun 2016 dengan selisih yang besar, kemudian dari survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga independen menunjukkan kepuasan rakyat Filipina terhadap kepemimpinan Presiden Duterte. Sehingga Presiden Duterte menjadi sentris dalam pengambilan semua kebijakan, termasuk meninjau ulang hubungan Filipina dan AS karena AS tidak mendukung dan malah mengkritik kebijakan *War on Drugs* yang dikeluarkan Presiden Duterte. Kemudian dari kondisi ekonomi dan militer, Filipina selama ini sangat bergantung dengan bantuan luar negeri dari AS dan barang-barang dari AS. Lalu Presiden Duterte menyadari bahwa Tiongkok saat ini menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia yang baru, terutama dengan pendanaan tidak terbatasnya sehingga membuat Presiden Duterte mencoba untuk bermain di dua kaki untuk meraih kepentingan nasional Filipina baik dari AS maupun Tiongkok.

Dari segi militer, Filipina bisa dikatakan sangat lemah karena di Kawasan Asia Tenggara saja menurut data dari *Index Power* yang dirilis *Global Fire Power* pada 2017, menempatkan Filipina di urutan ke enam. Bersamaan dengan upaya agresif Tiongkok dalam membangun pangkalan militer mereka di Laut China Selatan, maka Presiden Duterte harus berpikir ulang jika ingin berkonfrontasi militer secara langsung dengan Tiongkok. Sehingga pilihan terbaiknya adalah bekerjasama dengan Tiongkok, tetapi hal ini yang membuat AS menjadi gerah karena AS sendiri hingga saat ini masih memiliki pangkalan militer di Filipina. Determinan ketiga yaitu konteks internasional, pada era ini kita tidak bisa menutup mata bahwa persaingan antara AS dan Tiongkok dalam bidang ekonomi, militer, dan perebutan pengaruh di dunia internasional

semakin kentara. Filipina juga mengalami apa yang Penulis sebut sebagai “Persimpangan Jalan”, karena di satu sisi Filipina adalah sekutu lama AS di Asia Tenggara namun disisi lain Presiden Duterte juga menyadari keuntungan besar yang bisa diperoleh Filipina jika melakukan hubungan kerja sama yang erat dengan Tiongkok. Sehingga hal ini lah yang menjadi dasar politik luar negeri Filipina di era Presiden Duterte, yaitu ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya bagi Filipina dengan risiko terjadi gejolak antara hubungan Filipina dan AS.

Daftar Pustaka

- Adiningsih, Sri, dan Rosa Kristiadi. 2013. *Krisis Ekonomi Eropa: Terus Berlanjut*. 20 Februari. Diakses Agustus 7, 2018. <https://macroeconomicdashboard.feb.ugm.ac.id/krisis-ekonomi-eropa-terus-berlanjut/>.
- Agoncillo, Teodoro Andal. 1990. *"11. The Revolution Second Phase", History of the Filipino People (edisi ke-Eighth)*. Manila: University of the Philippines.
- Akmal, Sandi. 2016. “China dan Politik Luar Negerinya.” *repository.umy.ac.id*. Diakses Januari 21, 2018. <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/9551>.
- Amalia, I.N. 2015. “Peran Xi Jinping dalam Penerapan Kebijakan Modernisasi Kapabilitas Militer Tiongkok.” *www.digilib.unila.ac.id*. Diakses Februari 6, 2018. <http://digilib.unila.ac.id/27471/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>.
- Amri, Arfi Bambani. 2013. *Komitmen China Prioritaskan ASEAN*. 26 November. Diakses Agustus 2, 2018. <https://www.viva.co.id/berita/dunia/461452-kerja-sama-2-7-komitmen-china-prioritaskan-asean>.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Athlaus, Catherine, dan Glyn Davis. 2007. *The Australian Policy Handbook*. Melbourne: A&U Academic.

- Bahtiar, Saviq. 2017. *ASEAN Butuh China atau China Butuh ASEAN?* 8 September. Diakses Juli 26, 2018. <http://marketeers.com/asean-butuh-china-atau-china-butuh-asean/>.
- Bates, Gill. 2013. "From Peaceful Rise to Assertiveness? Explaining Changes in China's Foreign and Security Policy Under Hu Jintao." *Stockholm: SIPRI Conference The Hu Jintao Decade in China's Foreign and Security Policy (2002-2012)* 2.
- BBC. 2016. *Dikatai 'anak pelacur,' Presiden Obama batalkan pertemuan dengan Presiden Duterte.* 6 September. Diakses Desember 3, 2018. https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/09/160905_dunia_duterte_obama.
- . 2016. *Duterte kutuk lagi presiden AS: Pergilah ke neraka, Obama!* 6 Oktober. Diakses Desember 3, 2018. https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/10/161005_dunia_duterte_kutuk_obama.
- Berita Satu. 2016. *Di Jepang, Duterte Kembali Luapkan Amarah pada AS.* 26 Oktober. Diakses Desember 3, 2018. <http://sp.beritasatu.com/home/di-jepang-duterte-kembali-luapkan-amarah-pada-as/117305>.
- . 2011. *Pusat ASEAN-China Diluncurkan.* Diakses Juli 27, 2018. <http://www.beritasatu.com/bisnis/17873-pusat-asean-china-diluncurkan.html>.
- Chan, Irene. 2015. "China's Maritime Silk Road: The Politics of Routes." *RSIS Commentary No. 051* 1.
- Chan, Kin Man. 2010. *Harmonious Society.* Hong Kong: The Chinese University of Hongkong.
- Chandra, Ardan Adhi. 2017. *Ekonomi Filipina Tumbuh 6,9% di Kuartal III-2017.* 17 November. Diakses Juni 12, 2019. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3731458/ekonomi-filipina-tumbuh-69-di-kuartal-iii-2017>.
- Chaturvedy, Rajeev Ranjan. 2014. "New Maritime Silk Road: Converging Interests and Regional Responses." *ISAS Working Paper, No. 197* 7.
- Chiang, Jeremy. 2017. "Philippine Foreign Policy in the 21st Century: the Influence of Double-Asymmetric Structure."

- China Embassy. 2017. *Belt and Road Forum Berakhir, Hasilkan Sejumlah Kesepakatan Kerja Sama*. 16 Mei. Diakses Agustus 2, 2018. <http://id.china-embassy.org/indo/xwdt/t1462679.htm>.
- . 2014. *Kunjungan Xi Jinping Ekspresi Strategi Kebijakan Luar Negeri*. 9 Oktober. Diakses Agustus 2, 2018. <http://id.china-embassy.org/indo/xwdt/t1198937.htm>.
- Cipto, Bambang. 2007. *Hubungan Internasional Asia Tenggara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Coplin, William D. 1992. "Pengantar Politik Internasional. Suatu Telaah Teoritis, Edisi kedua." 30. Bandung: CV. Sinar Bandung. Diakses Februari 08, 2019. <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-kebijakan-luar-negeri-foreign-policy/5593>.
- Debora, Yantina. 2017. *Ambisi Cina dengan Proyek Jalur Sutra Abad 21*. 6 September. Diakses Agustus 2, 2018. <https://tirto.id/ambisi-cina-dengan-proyek-jalur-sutra-abad-21-cv27>.
- DW. 2014. *Ambisi Militer Cina*. 3 Maret. Diakses Agustus 7, 2018. <https://www.dw.com/id/ambisi-militer-cina/a-17476820>.
- . 2017. *Dua Wajah Cina di Asia Tenggara*. 2 Juni. Diakses Agustus 7, 2018. <https://www.dw.com/id/dua-wajah-cina-di-asia-tenggara/a-17147375>.
- . 2017. *Filipina Kecam Cina Karena Sita Ikan Nelayan di Laut Cina Selatan*. 20 Agustus. Diakses Agustus 7, 2018. <https://www.dw.com/id/filipina-kecam-cina-karena-sita-ikan-nelayan-di-laut-cina-selatan/a-44155041>.
- Elisabeth, A. 2015. "Orientasi Politik Luar Negeri China." *www.repository.umy.ac.id*. Diakses Februari 21, 2018. <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/11751/6.%20BAB%20ii.PDF?sequence=6&Allowed=y>.
- European Union. 2015. *The Asian Infrastructure Investment Bank*. 24 April. Diakses Agustus 2, 2018. https://ec.europa.eu/epsc/publications/strategic-notes/asian-infrastructure-investment-bank_en.

- Fei, Gao. 2010. *The Shanghai Cooperation Organization and China's New Diplomacy*. Amsterdam: Netherlands Institute of International Relations 'Clingendael'.
- Fung Business Intelligence Centre. 2015. "The Silk Road Economic Belt and the 21st Century Maritime Silk Road." 2.
- Goh, Evelyn. 2007. "Great Powers and Hierarchical Order in Southeast Asia: Analyzing Regional Security Strategies." *International Security*, Vol. 32 113-157.
- Haffar, W. 2017. *Investasi China di Asia Tenggara Berkah atau Masalah*. Diakses Februari 6, 2018. <http://www.dw.com/id/investasi-cina-di-asia-tenggara-berkah-atau-masalah/a-38580842>.
- Hasan, Akhmad Muawal. 2017. *Jepang-India Pun Membikin Jalur Sutra untuk Saingi Cina*. 7 September. Diakses Agustus 8, 2018. <https://tirto.id/jepang-india-pun-membikin-jalur-sutra-untuk-saingi-cina-cv8l>.
- . 2017. *Menghidupkan Jalur Sutra Lewat Kereta Barang Cina-London*. 9 Januari. Diakses Agustus 2, 2018. <https://tirto.id/menghidupkan-jalur-sutra-lewat-kereta-barang-cina-london-cfRM>.
- Heydarian, Richard Javad. 2017. *China Makin Mendominasi Asia Tenggara, Sementara Amerika Terus Menjauh*. 29 Desember. Diakses Agustus 1, 2018. <https://www.matamatapolitik.com/china-makin-mendominasi-asia-tenggara-sementara-amerika-terus-menjauh/>.
- . 2017. *Kerahkan Militernya, Tiongkok Kini Kendalikan Laut China Selatan*. 9 Mei. Diakses Agustus 7, 2018. <https://www.matamatapolitik.com/kerahkan-militernya-tiongkok-kini-kendalikan-laut-china-selatan/>.
- Holsti. 1983. *International Politics*. New Delhi: Prentice Hall of India PL.
- Idris, Muhammad. 2017. *Ambisi China Dominasi Ekonomi Dunia Lewat Jalur Sutra*. 16 Mei. Diakses Agustus 8, 2018. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3502221/ambisi-china-dominasi-ekonomi-dunia-lewat-jalur-sutra>.

- Imron, S. 2017. "Penguatan Ekonomi Republik Rakyat China Di ASEAN Melalui Diplomasi Ekonomi." *www.eprints.uns.ac.id*. Diakses Februari 2, 2018. <https://eprints.uns.ac.id/32252/>.
- Jemadu, Liberty. 2014. *Filipina dan Amerika Serikat Tandatangani Pakta Pertahanan Baru*. 28 April. Diakses Desember 4, 2018. <https://www.suara.com/news/2014/04/28/151544/filipina-dan-amerika-serikat-tandatangani-pakta-pertahanan-baru>.
- KEMENLU RI. 2015. *Kerja Sama Eksternal ASEAN Mitra Wicara Organisasi Internasional ASEAN*. 20 Maret. Diakses Juli 26, 2018. <https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/asean/Pages/Kerja-Sama-Eksternal-ASEAN-Mitra-Wicara-Organisasi-Internasional-ASEAN.aspx>.
- . 2015. *Sejarah dan Latar Pembentukan ASEAN*. 17 Maret. Diakses Juli 2018, 31. <https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/asean/Pages/Sejarah-dan-Latar-Pembentukan-ASEAN.aspx>.
- KOMPAS. 2016. *Rodrigo Duterte Resmi Dilantik Jadi Presiden Ke-16 Filipina*. 30 Juni. Diakses Desember 2, 2018. <https://internasional.kompas.com/read/2016/06/30/12364261/rodrigo.duterte.resmi.dilantik.jadi.president.ke-16.filipina>.
- Kompas. 2016. *Takut Ditembak Mati, 500.000 Pengedar dan Pengguna Narkoba di Filipina Menyerah*. 15 Agustus. Diakses Juni 9, 2019. <https://internasional.kompas.com/read/2016/08/05/21304401/takut.ditembak.mati.500.000.pengedar.dan.pengguna.narkoba.di.filipina.menyerah>.
- Kuchma, Anna. 2015. *Bergabung dengan Asian Infrastructure Investment Bank, Apa yang Didapatkan Rusia?* 31 Maret. Diakses Agustus 2, 2018. https://id.rbth.com/economics/2015/03/31/bergabung_dengan_asian_infrastructure_investment_bank_apa_yang_dida_27293.
- Kurniawan, Frendy. 2017. *Siapa Militer Terkuat di Asia Tenggara?* 17 Oktober. Diakses Juni 12, 2019. <https://tirto.id/siapa-militer-terkuat-di-asia-tenggara-cyfb>.

- Mas'ood, Mohtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional*. Jakarta: LP3ES.
- Mustajib, Sharif. 2017. *The Chinese new project One Belt One Road: new trend in globalization?* 10 Juni. Diakses Agustus 1, 2018. http://internationalaffairsbd.com/one_belt_one_road/.
- Noah Friedman, Paul Szoldra and Skye Gould. 2017. *Here are the countries with the most powerful militaries in the world*. 17 Maret. Diakses Juni 12, 2019. <https://www.businessinsider.com/global-firepower-index-most-powerful-militaries-in-the-world-ranked-2017-3/?IR=T>.
- Olton, Jack C Plano & Roy. 1969. *The International Relations Dictionary*. United States of America: Rinehart and Winston inc.
- People's Daily Online. 2009. *President Hu Elaborates the Theory of Harmonious World*. Diakses Juli 26, 2018. <http://en.people.cn/90001/90780/91342/6824821.html>.
- PQ News. 2015. *China Kurangi Kapasitas Industri yang Kelebihan Produksi*. 30 Januari. Diakses Agustus 7, 2018. <https://ipqi.org/china-kurangi-kapasitas-industri-yang-kelebihan-produksi/>.
- Prihtiyani, Eny. 2013. *Cadangan Devisa China Terbesar di Dunia*. 10 Januari. Diakses Agustus 7, 2018. <https://nasional.kompas.com/read/2013/01/10/16320578/cadangan.devisa.china.terbesar.di.dunia>.
- Puryadi, Awan. 2013. *Arah Perubahan Politik China*. 16 Maret. Diakses Juli 26, 2018. http://www.gresnews.com/berita/analisis_hukum/81097-arah-perubahan-politik-china/.
- Ramadhani, Khairil. 2017. *China Versus AS: Perang Ideologi Jilid 2*. 2 April. Diakses Agustus 3, 2018. <https://internasional.kompas.com/read/2017/04/02/17484951/china-versus-as-perang-ideologi-jilid-2>.
- Rozanov, Anatoliy A. 2013. "The Shanghai Cooperation Organization and Central Asia's Security Challenge." *Minsk: DCAF Regional Programme Series No. 16* 15-16.

- Sari, Amanda Puspita. 2016. *PBB Ingin Selidiki Pembunuhan dalam Perang Narkoba Duterte*. 26 September. Diakses Desember 3, 2018. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160926142720-106-161192/pbb-ingin-selidiki-pembunuhan-dalam-perang-narkoba-duterte>.
- Sebastian, Lucky. 2017. *Kenapa Produk 'Made in China' Mendominasi?* 20 April. Diakses Agustus 7, 2018. <https://inet.detik.com/konsultasi-gadget/d-3486763/kenapa-produk-made-in-china-mendominasi>.
- Setiawan, Sakina Rakhma Diah. 2016. *Proyek "One Belt One Road" China, Apa Untungnya bagi ASEAN?* 20 November. Diakses Agustus 8, 2018. <https://ekonomi.kompas.com/read/2016/11/20/122400626/proyek.one.belt.one.road.china.apa.untungnya.bagi.asean>.
- Shintia, Dwi. 2017. *Tiongkok Berambisi Menyatukan Tiga Benua dalam Satu Jalur Perdagangan*. 15 Mei. Diakses Agustus 2, 2018. <https://www.jawapos.com/internasional/15/05/2017/tiongkok-berambisi-menyatukan-tiga-benua-dalam-satu-jalur-perdagangan>.
- Sidik, Jafar M. 2016. *Keras dan tegas membuat rakyat Filipina sangat sukai Presiden Duterte*. 6 Oktober. Diakses Juni 9, 2019. <https://www.antaraneews.com/berita/588703/keras-dan-tegas-membuat-rakyat-filipina-sangat-sukai-presiden-duterte>.
- Sorensen, Robert Jackson & Georg. 2013. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. New York: Pustaka Pelajar.
- Sukamta. 2017. *Menimbang Ekspansi Ekonomi China di ASEAN*. 18 Januari. Diakses Agustus 1, 2018. <https://nasional.sindonews.com/read/1171946/18/menimbang-ekspansi-ekonomi-china-di-asean-1484722393/>.
- Sukma, Rizal. 2015. "Pengantar Politik Luar Negeri China." *www.elisa.ugm.ac.id*. Diakses Februari 24, 2018. <http://elisa.ugm.ac.id/user/archive/download/30330/1c0d4f514d3c529c38'e9c3ff6decc45>.

- . 2012. *www.kompas.com*. 11 April. Diakses Juli 27, 2018. <https://internasional.kompas.com/read/2012/04/11/02542066/ASEAN.dan.Sengketa.Laut.China.Selatan>.
- Syaifulloh, I. 2016. *Diplomasi Ekonomi Republik Rakyat China*. November. Diakses Februari 6, 2018. <https://jurnalhiuns.files.wordpress.com/2016/11/diplomasi-ekonomi-republik-rakyat-china.pdf>.
- Symon, Catherine Cassel, dan Gillian. 1994. *Qualitative Methods in Organizational Research*. London: Sage Publications.
- Taniputera, Ivan. 2011. *History of China*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- TEMPO. 2013. *Menggeliatnya Kekuatan Militer Cina*. 19 Maret. Diakses Agustus 7, 2018. <https://dunia.tempo.co/read/468105/menggeliatnya-kekuatan-militer-cina/full&Paging=Otomatis>.
- . 2017. *Pertama Kali, Donald Trump Undang Duterte ke Gedung Putih*. 30 April. Diakses Desember 30, 2018. <https://dunia.tempo.co/read/870918/pertama-kali-donald-trump-undang-duterte-ke-gedung-putih/full&view=ok>.
- Tom, Orlik, dan Min Jung Kim. 2012. "Charting China's Economy: 10 Years Under Hu." *Wall Street Journal* 16.
- Utomo, Happy Ferdian Syah. 2017. *Militer Tiongkok Diam-Diam Pasang Sistem Pertahanan Rudal di Laut China Selatan?* 3 Mei. Diakses Agustus 7, 2018. <https://www.liputan6.com/global/read/3498981/militer-tiongkok-diam-diam-pasang-sistem-pertahanan-rudal-di-laut-china-selatan>.
- Ventura, Bona. 2017. *Pertumbuhan Tercepat di Dunia, Filipina Macan Ekonomi Asia*. 26 Januari. Diakses Juni 11, 2019. <https://ekbis.sindonews.com/read/1174418/35/pertumbuhan-tercepat-di-dunia-filipina-macan-ekonomi-asia-1485417043>.

- VOA Indonesia. 2017. *Kejahatan Turun Lebih dari 20 Persen di Filipina*. 27 Desember. Diakses Juni 8, 2019. <https://www.voaindonesia.com/a/kejahatan-turun-lebih-dari-20-persen-di-filipina/4180978.html>.
- . 2016. *Pertumbuhan Ekonomi Filipina Tercepat di Asia Tenggara*. 30 12. Diakses Juni 11, 2019. <https://www.voaindonesia.com/a/pertumbuhan-ekonomi-filipina-tercepat-di-asia-tenggara/3656818.html>.
- Zha, Daojiong, dan Weixing Hu. 2006. *Building a Neighborly Community: Post-Cold War China, Japan, and Southeast Asia*. Manchester: Manchester University Press.
- Zheng, Yongnian, dan Sow Keat Tok. 2007. ““Harmonious Society” and “Harmonious World”: China’s Policy Discourse Under Hu Jintao.” *Briefing series-Issue 26 Nottingham University* 1.